

PERDA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI KABUPATEN PEMALANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 18, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 18

ABSTRAK :) Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip yang meliputi pengelolaan arsip dinamis dan statis. Pengelolaan arsip dinamis dimulai dari penciptaan sampai dengan penyusutan, yang pelaksanaannya secara sistematis mengacu pada rancang bangun dan pengoperasian yang terpadu antara sistem kearsipan dan sistem kegiatan organisasi dalam pengelolaannya sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu. Sedangkan pengelolaan arsip statis dilaksanakan secara profesional bertujuan untuk menjamin keberadaan arsip statis di Kabupaten Pemalang sebagai pertanggungjawaban dan memori kolektif masyarakat Kabupaten Pemalang, sehingga pada akhirnya dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat luas.

) Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 4 Tahun 1990, UU No. 8 Tahun 1997, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 19 Tahun 2016, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 43 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 32 Tahun 1950, PP No 87 Tahun 1999, PP No. 88 Tahun 1999, PP No. 61 Tahun 2010, PP No 28 Tahun 2012, PP No. 82 Tahun 2012, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2017, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2015, Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2015, Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2017

) Muatan dalam Perda ini adalah:
Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Asas, Sasaran, dan Ruang Lingkup, Kewajiban dan Wewenang, Pengelolaan Arsip, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, Monitoring dan Evaluasi, Sistem Kearsipan Daerah, Sistem Informasi Kearsipan Daerah, dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah, Organisasi Kearsipan, Sumber Daya Kearsipan, Layanan dan Publikasi, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Larangan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN) Perda ini ditetapkan di Pemalang pada tanggal 25 September 2017.
) Diundangkan di Pemalang pada tanggal 25 September 2017.

PERBUP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 18

ABSTRAK :) Berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyebutkan bahwa Izin Pemanfaatan Ruang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota.
Dalam rangka pengendalian terhadap pemanfaatan dan/atau penggunaan tanah untuk kegiatan usaha dengan luas tanah/lahan di bawah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), maka Pemerintah Daerah perlu menyusun peraturan perizinan perubahan penggunaan tanah dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

) Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 11 Tahun 1974, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2011, UU No. 2 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 32 Tahun 1950, PP No 87 Tahun 1999, PP No. 16 Tahun 2004, PP No. 15 Tahun 2010, Perka BPN No 2 Tahun 2011, Permen ATR/ Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 Perda Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2015, Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011, Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2015, Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2016.

) Muatan dalam Perbup ini adalah:
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Izin Perubahan Penggunaan Tanah, Tata Cara Permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, Perubahan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin Perubahan Penggunaan Tanah, Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi, Ketentuan Penutup.

CATATAN) Perbup ini ditetapkan di Pemalang pada tanggal 19 April 2017.
) Diundangkan di Pemalang pada tanggal 19 April 2017.